

Hegemoni kerajaan Gowa dan Perang Makassar

F a d l i

Universitas Negeri Yogyakarta
fadliblk60@gmail.com

Abstract

The Makassar war is one of the major wars that occurred in the archipelago, so it is important to study it. Seeing that the impact was large enough for a change in the life of the Makassar people at that time, thus making the Gowa-Tallo kingdom have to accept defeat and compensate for all war losses, and must be bow to the Dutch East Indies government. This study is a historical study with the stages of heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Based on the results of the initial study, information was obtained regarding the background of the Makassar war, the course of the Makassar war until the collapse of the Gowa-Tallo kingdom as a sign of the end of the Makassar war. However, the resistance was continued by the kings of the vassal kingdoms of Makassar, so that some people had to choose between participating in the rebellion or submitting to the Dutch East Indies government. Finally, at the end of the 17th century the dissidents were conquered and the government succeeded in establishing a central government centered on the Fort Rotterdam. This is what researchers will study in order to be able to provide results related to socio-economic life after the Makassar war.

Keywords; *Socio-Economic, Makassar War, Fort Rotterdam*

Abstrak

Perang makassar merupakan salah satu perang yang besar yang terjadi di Nusantara sehingga penting untuk di telaah. Melihat dampak yang disailkan cukup besar untuk terjadinya perubahan tatanan kehidupan masyarakat Makassar pada waktu itu sehingga membuat kerajaan Gowa-Tallo harus menerima kekalahan dan mengganti semua kerugianperang, serta harus tunduk terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Kajian ini merupakan kajian sejarah dengan tahapan heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan hasil kajian awal diperoleh informasi terkait latar belakang terjadinya perang Makassar, jalanya perang Makassar sampai pada akhirnya runtuknya kerajaan Gowa-Tallo sebagai tanda berakhirnya perang Makassar. Walaupun demikian perlawanan tetap dilanjutkan oleh raja-raja dari kerajaan bawahan Makassar sehingga membuat sebahagian masyarakat harus memilih antara ikut memberontak atau tunduk pada pemerintahan Hindia belanda. Pada akhirnya pada akhir abad ke-17 para pembangkan berhasil ditaklukkan dan pemerintah berhasil mendirikan Pusat Pemerintahan yang berpusat di Benteng Fort Rotterdam. Hal inilah yang kemudian akan dikaji peneliti agara mampu memeberikah hasil terkai kehidupan sosial ekonomi pasca perang Makassar.

Kata Kunci: Sosial Ekonomi, Perang Makassar, Fort Rotterdam

Pendahuluan

Pada tahun 1596 Belanda berhasil berlabuh di Nusantara di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, sampai pada akhirnya Belanda berhasil mendirikan kongsi dagang pada tahun 1602 dan masuk ke Nusantara pada tahun 1610 yang ditandai dengan berdirinya pos perdagangan di Banten, dengan tahun yang sama pula melakukan kerja sama dengan pangeran wijayakrama di jayakarta.

Pada tahun 1607 belanda menginjakkan kakinya di bumi Sulawesi, ketika Belanda di bawah Laksamana Belanda Cornelis Matelijft berlabuh didekat desa Tanakeke di pantai selatan Sulawesi dan melanjutkan ke Marc tanpa melakukan apa-apa. Van Dolt Jacquest Hermite singgah di Makassar dan meminta Gowa untuk tidak mengirim beras ke Malaka dan membuka pelabuhan, tetapi Gowa tidak menurut dan mengunjungi kantor perdagangan di Makassar.

Kehadiran Belanda di Sulawesi pada tahun 1607 tidak disambut baik, walaupun belum mendapatkan izin untuk menetap di Makassar bedahalnya dengan portugis dan orang-orang inggris yang sudah menetap di Makassar. Belanda dalam hal ini Voc di khawatirkan akan mempengaruhi kerja sama dagan Kerajaan Gowa dengan pedagan-pedagan dari Portugis dan Inggris. Hal ini didasarkan pada kegiatan Voc dalam memonopoli perdagang dan cara mereka mengatur perdagangan yang menyimpang.

Melihat posisi kerajaan Gowa pada saat itu merupakan salah satu tempat atau pelabuhan yang strategis untuk melakukan perdagangan, termasuk dalam jalur perdagangan Internasional pada Abad ke-17. Inilah yang kemudian menjadi alasan Belanda dalam hal ini Voc memiliki semangat untuk menguasai daerah kerajaan Gowa secara khusus dan Sulawesi secara umum. Letak yang strategis merupakan faktor utama yang membuat Voc ingin melakukan penguasaan terhadap Kerajaan Gowa.

Kejayaan Kerajaan Gowa pada abda ke-17 membuat posisi Voc di Indonesia timur terancam. Perseteruan antara Kerajaan Gowa dan Voc tidak lagi dapat terelakkan hal ini terjadi karena Voc ingin memonopoli perdagangan di Inonesia Timur dalam hal ini perdagangan yang ada di Pelabuhan Somba Opu sebagai pusat perdagangan di Kerajaan Gowa-Tallo. Selain itu, Voc melakukan blokade terhadap kapal-kapal yang ingin berlabuh di pelabuhan Somba Opu. Inilah salah satu faktor yang membuat abisi Voc untuk menguasai Kerjaan Gowa Tallo semakin besar.

Sejak kedatangan Belanda di Sulawesi atau di tanah kerjaan Gowa pada tahun 1607 telah menimbulkan peristiwa-peristiwa yang akhirnya sampai pada perang, yaitu pada tahun 1636 terjadi pemblokiran terhadap Makassar, kemudian pada tahun 1655 perebutan kekuasaan terhdap Buton yang berhasil dikuasai Belanda, dan pada tahun 1660 awal dari perang penaklukan terhadap

kerajaan Gowa, sampai pada puncaknya yaitu pada tahun 1666-1667 terjadi perang terbuka yang dikenal dengan sebutan perang Makassar yang berakhir dengan perjanjian Bungaya.

Serangan berkali kali dilancarkan oleh Voc terhadap Kerajaan Gowa namun Voc mendapat perlawanan mengingat pasukan yang dimiliki kerajaan Gowa termasuk kuat. Memiliki basis pertahanan militer yang harus di perhatikan oleh Voc (M.C. Ricklefs, 2007: 142-143). Gowa di anugrahi para pemimpin atau raja yang cakap dalam mengelolah kekuasaannya terlebih lagi kerajaan tersebut semakin kuat setelah bekerja sama dengan Kerajaan Tallo pada pertengahan abad ke-16

Dampak dari perseteruan antara Makassar dengan Belanda membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat suku Bugis dan suku Makassar di bumi sulawesi, baik itu politik sistem ekonomi sampai pada kehidupan sosial yang berubah akibat dari kalahnya Makassar dalam perang makassar yang di atur dalam perjanjian *Ri Cappa'na Bungaya*.

Pembahasan

1. Perang Makassar 1666-1667

Jauh sebelum pecahnya perang Makassar pada tahun 1666, kedatangan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie*) sebagai perserikatan dagang Belanda di jazirah Sulawesi Selatan tidak lain bertujuan memonopoli perdagangan. Hal ini melihat Makassar sebagai kota pelabuhan yang sangat ramai dan strategis dalam jalur perdagangan dunia. Keinginan VOC untuk melakukan pelayaran dan perdagangan di Sulawesi Selatan jelas mendapat penolakan dari Gowa sebagai kerajaan besar yang berkuasa saat itu. Lambat laun, muncul ketegangan antara Kerajaan Gowa dengan Kompeni dan kian memburuk. VOC selalu mencoba upaya diplomasi terhadap Kerajaan Gowa. Penolakan Gowa terhadap upaya diplomasi ini menunjukkan rasa percaya diri Kerajaan Gowa sebagai satu kekuatan yang harus diperhitungkan VOC. Upaya diplomasi tidak dindahkan, VOC mulai melakukan penyerangan kecil pada tahun 1653 dengan mengepung pelabuhan Makassar, namun pasukan Kerajaan Gowa mampu mendobrak kekuatan pasukan VOC.

Beberapa penyerangan selanjutnya terjadi pada tahun 1654 hingga 1655 dengan memblokade pelabuhan Somba Opu. Pertempuran juga terjadi di Buton dan Maluku. Perang yang dilakukan di beberapa titik ini menyebabkan Belanda kewalahan untuk mengatasinya, sementara Kerajaan Gowa terus mendapat bantuan secara teratur dari Gowa. Namun tetap dengan gigih Kerajaan Gowa memukul mundur pasukan Belanda walaupun dengan pasukan armada yang lebih besar. Alhasil, pada tanggal 23 Oktober 1655 kapal Belanda yang berusaha memblokade perairan Gowa berhasil

diledakkan. Bahkan pimpinan kapal Belanda bernama Caspar Buytendijk dan 24 orang awak kapalnya tewas.

Selain penyerangan, VOC berusaha terus menempuh jalur diplomasi. Tercatat perjanjian yang pernah dilakukan yakni perjanjian 26 Juni 1637, perdamaian 12 Desember 1655, dan 19 Agustus 1660. Walaupun dengan perjanjian perdamaian tersebut, hubungan baik antara Belanda (VOC) dan orang-orang Makassar (Kerajaan Gowa) tidak dapat terjamin sebab kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Agussalim menjelaskan bahwa dua kepentingan yang berbenturan dimana VOC walaupun telah melakukan perjanjian damai, tetap saja ambisi untuk menjajah dan memonopoli perdagangan akan selalu ada (Agussalim, 2016: 65-69). Di sisi lain, Kerajaan Gowa ingin hidup bebas, menjadi satu-satunya kerajaan terkuat di Sulawesi Selatan, maka menolak kedatangan bangsa asing untuk berdagang.

Seiring waktu, perlawanan kian memanas. Ditambah dengan pelarian La Tenritatta Arung Palakka menuju Buton untuk bersekutu dengan VOC guna membalas dendamnya terhadap Kerajaan Gowa. Sebelum pecahnya perang Makassar, ada beberapa peristiwa yang menambah ketegangan antara VOC dan Kerajaan Gowa (Agussalim, 2016: 70-71):

1. Kapal Belanda yang memasuki perairan Gowa tanpa izin pada 1662, orang-orang Makassar mengejar dan berhasil merampas persenjataan kapal *De Walvis* sebanyak 16 buah meriam.
2. Pada Desember 1664, kapal Belanda pimpinan *De Leewin* ditangkap dan sebagian bahkan ditenggelamkan oleh pihak Kerajaan Gowa.
3. Terbunuhnya Cornelis Kuyf dan 14 anak buahnya yang mencoba untuk memasuki wilayah perairan Gowa. Disini terjadi pertempuran yang menewaskan Cornelis Kuyf beserta seluruh anak buahnya.

Pada tahun 1666 pecahlah Perang Makassar, ketika pasukan Kerajaan Bone bersatu dengan Belanda dibawah pimpinan Admiral Speelman dimana disiapkanlah 21 buah kapal perang yang besar. Gabungan pasukan ini dibantu dengan Ternate, Buton, dan Ambon dibawah pimpinan Kapten Jonker. Selain itu, oleh Zainuddin Tika menyebutkan bahwa kekuatan serdadu bantuan juga berasal dari Jawa dan Madura (Tika, 2006: 39). Armada ini meninggalkan Batavia pada 24 November 1666 dan tibalah armada VOC di Somba Opu pada tanggal 19 Desember 1666. Sebelum melakukan penyerangan, Admiral Speelman mula-mula memberi tuntutan kepada Sultan Hasanuddin agar semua orang-orang Makassar yang telah melakukan pembunuhan terhadap utusan-utusan Belanda yang datang sebelumnya menyerahkan diri (Agussalim, 2016: 72). Speelman juga menuntut agar

Kerajaan Gowa membayar kerugian yang dialami Belanda akibat terbunuhnya anak buah kapal milik Belanda yang mencoba memeriksa penyebab tenggelamnya kapal De Leeuwin (Mappangara, 2004: 362). Namun pesan ini ditolak oleh Raja Gowa Sultan Hasanuddin. Ancaman Belanda tak sedikitpun menggoyahkan tekad rakyat Kerajaan Gowa.

Barulah pada tanggal 21 Desember 1666 terjadi perang terbuka. Dikibarkannya bendera merah sebagai pertanda serangan dimulai, Belanda menyerang Gowa dari laut, sedangkan Bone menyerang melalui darat (Perlas, 2006: 165). Gempuran dimulai dengan meriam-meriam dari kapal Belanda, menembak Somba Opu. Dibalas pula oleh laskar-laskar Kerajaan Gowa dengan perahu berhias senjata. Selama peperangan, tembakan Belanda tidak banyak merusak alat-alat pertahanan Kerajaan Gowa. Pasukan Belanda kemudian menyusuri daerah kekuasaan Kerajaan Gowa dari Pantai Somba Opu menuju Laikang (Turatea) pada 23 Desember 1666, disini pasukan Belanda mendapat serbuan ketika memasuki perkampungan, panah-panah beracun dan kurang menguasai medan membuat mereka melarikan diri meninggalkan Laikang. Pasukan Belanda kemudian sampai di Bantaeng pada 25 Desember 1666. Posisi Bantaeng yang merupakan pusat makanan bagi Kerajaan Gowa saat itu berhasil direbut oleh pasukan Belanda, kapal-kapal milik pedagang yang berlabuh di perairan Bantaeng ditenggelamkan. Bagaimana tidak, hal ini menyebabkan kekuatan persenjataan Kerajaan Gowa semakin tidak seimbang. Akhirnya, Bantaeng berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Sementara di Somba Opu, kapal niaga yang bersandar tenggelam satu-persatu bahkan merusak lumbung pangan desa.

Kerajaan Gowa yang juga terus melakukan perlawanan tidak hanya berfokus pada satu titik. Pasukan Gowa telah menyiapkan pasukan perang yang berkekuatan sekitar 700 buah kapal dan 20.000 pasukan yang siap menyerang Belanda dan VOC. Pasukan ini dipimpin oleh Karaeng Bontomarannu yang dibantu oleh Sultan Bima dan Raja Luwu. Perlawanan pecah kembali pada 1 Januari 1667 di Buton dimana Belanda mengepung Gowa dari laut. Pasukan Belanda dan Arung Palakka terus menggempur pasukan Gowa, ditambah pula kekuatannya oleh pasukan Sultan Buton (Mappangara, 2004: 364) hingga perlawanan berlangsung sengit. Alhasil perlawanan ini kembali dimenangkan oleh pasukan Belanda. Pasukan Gowa menjadi tawanan Belanda, termasuk Karaeng Bontomarannu, Sultan Bima, Raja Luwu, dua orang Bangsawan Mandar, putra dan saudara kandung Karaeng Bontomarannu. Hal ini juga disebutkan dalam Lontarak Bilang Raja Gowa dan Tallok.

Hera 1667

3 Januari, 8 Rakjak, allo Sanneng.

Nanialle dulunga ri Butung

Artinya:

3 Januari, 8 Rajab, hari Senin

Panglima perang tertangkap di Buton (yaitu Karaeng Bontomarannu, Raja Bima, dan Raja Luwuk).

Dalam memperkuat pasukan perang selanjutnya, Belanda melakukan perjalanan ke Ternate, Bacan dan Tidore untuk menghimpun prajurit yang akan bergabung dengan pasukan Arung Palakka. Pada Juni 1667 tiba kembali di Buton dalam rangka menyusun siasat untuk menyerang kembali Makassar. Dalam melakukan penyusupan ke Makassar melalui darat, Arung Palakka telah mengirim sebanyak 2.000 pasukan dibawah pimpinan Datu Soppeng dan Arung Kaju ke daerah Bone dan sekitarnya. Sementara Raja Gowa Sultan Hasanuddin, melihat segala yang telah rusak akibat peperangan maka segera dihimpun kembali. Benteng-benteng pertahanan Kerajaan Gowa yakni Benteng Somba Opu, Benteng Ujung Pandang, dan Benteng Panakkukang ditempatkan dan dibaginya pasukan pertahanan dan pimpinan pertahanan masing-masing benteng. Kemudian Bantaeng yang sebelumnya telah dirusak Belanda, juga dibangun kembali dilengkapi dengan pasukan pertahanan dibawah pimpinan Daeng Tulolo, saudara Sultan Hasanuddin. Pada tanggal 19 Juli 1667 Benteng Galesong mengalami serangan dari laut. Pasukan Galesong melakukan penyerangan terhadap pasukan Speelman, namun lumbung persediaan makanan di Galesong telah habis dibakar.

Setelah Galesong, bulan September 1667 Belanda mengepung benteng Barombong dari darat maupun laut. Pasukan dari darat bergerak dipimpin oleh Arung Palakka mendekati daerah pertahanan Gowa. Sementara pasukan yang menggempur melalui laut telah siap dengan meriam-meriamnya. Serangan yang dilakukan Belanda tidak cukup kuat, kedua kekuatan sama-sama menjatuhkan banyak korban. Dengan kekuatan sekitar 18 (delapan belas) buah meriam, pasukan Barombong melakukan serangan balasan terhadap pasukan Speelman. Namun bala bantuan untuk Speelman kembali didatangkan dari Batavia berupa 5 (lima) buah kapal perang dibawah pimpinan Kapiten Pierre Dupon hingga Benteng Barombong berhasil dibobol. Selanjutnya, Belanda terus memusnahkan satu per satu benteng pertahanan Gowa.

Untuk merintis perjalanan ke pusat-pusat pertahanan Gowa selanjutnya, maka pertempuran yang tak kalah menentukan terjadi lagi pada tanggal 26 Oktober 1667 merupakan perang terbuka di daerah garis Barombong-Makassar. Diturunkan pasukan Galesong, dibantu oleh pasukan Arung

Palakka yang berusaha menyusup melalui daratan. Pasukan darat ini dipimpin oleh Kapten Poolman, membuka pertempuran darat yang merintis jalan daratan untuk sampai ke Barombong dan akhirnya memasuki pusat-pusat pertahanan Gowa (Mappangara, 2004: 367). Kekuatan Gowa yang sudah tidak seimbang dalam menghadapi pasukan Belanda berhasil dipatahkan dengan direbutnya Barombong sebagai benteng Kerajaan Gowa.

Setelah melalui perang yang sangat dahsyat dan berlarut-larut, persediaan pasukan Kerajaan Gowa mulai menurun, kerusakan benteng, sawah pertanian, menimpa nasib buruk para panglima dan prajurit Kerajaan Gowa. Melihat keadaan ini, Belanda menawarkan perdamaian. Sultan Hasanuddin akhirnya menerima tawaran perundingan ini setelah beberap kali menolaknya. Maka diadakanlah Perjanjian Bongaya, disebut dalam bahasa Makassar *Cappaya ri Bungayya* dan dalam bahasa Belanda *Het Bungaisch Verdrag* atau *Bongaaisch Tractat*. Perjanjian ini merupakan perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh Kerajaan Gowa secara terpaksa dengan VOC (Belanda) yang ditandatangani pada 18 November 1667, melihat keadaan yang makin memburuk akibat perang yang menelan banyak korban serta biaya perang yang amat besar. Perjanjian Bongaya terdiri atas 30 pasal. Oleh Edward L. Polinggomang dalam bukunya, meringkas perjanjian ini antara lain sebagai berikut (Polinggomang, 2004: 125-126).

1. Makassar akan membayar semua kerugian yang diderita oleh kapalkapal Belanda yang kandas (De Leeuw dan Walvish) dan semua pelaku-pelakunya harus dihukum di depan resident VOC;
2. Compagnie (VOC) akan mendapat monopoli perdagangan;
3. Orang Inggris, Denmark, Spanyol dan Portugis dilarang berdagang di Makassar;
4. Orang Inggris yang barang-barangnya berada di Makassar harus diserahkan kepada Belanda;
5. Compagnie (VOC) akan dibebaskan dari cukai dan pajak-pajak pelabuhan;
6. Uang VOC berlaku di Makassar;
7. Semua benteng dan istana harus dihancurkan kecuali Benteng Ujungpandang yang diperuntukkan bagi VOC dan Benteng Somba Opu yang diperuntukkan bagi penguasa Kerajaan Makassar;
8. VOC juga akan menerima ganti kerugian perang sebesar 250.000 ringgit;
9. Kerajaan Makassar wajib membayar denda, (boete) terdiri atas 1.000 orang budak, lelaki dan perempuan yang sehat, baik yang masih muda maupun yang telah dewasa atau uang yang nilainya sama dengan harga jumlah budak-budak itu;

10. Raja akan kehilangan semua hak-haknya atas Sumbawa, Buton dan semua negeri di sekitar Celebes;
11. Pelaut dan pedagang Makassar dilarang berniaga ke arah Timur (Maluku);
12. Menetapkan kelompok politik Bugis dibawah penguasa Bone dan kelompok politik Makassar dibawah Penguasa Makassar;
13. Mengakui kedudukan VOC sebagai pelindung dan perantara kerajaan-kerajaan sekutu.

Atas penandatanganan Perjanjian Bongaya, banyak pembesar Kerajaan Gowa yang tidak setuju. Karena baginya, perjanjian ini sangatlah merugikan Kerajaan Gowa. Alasan terbesar bahwa daerah kekuasaan Gowa harus dilepaskan dan diberikan kepada Belanda. Benteng-benteng pertahanan Kerajaan Gowa harus di musnahkan, belum lagi monopoli perdagangan yang ingin dilakukan Belanda dan melarang kerajaan lain untuk melakukan kontak perdagangan di Makassar.

Beberapa akibat diberlakukannya Perjanjian Bongaya yang dikemukakan Abduh: Pertama, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari tahta Kerajaan Gowa pada 29 Juni 1669 lalu digantikan oleh puteranya, Amir Hamzah. Kedua, kebesaran Kerajaan Gowa yang sejak lama diakui oleh bangsa-bangsa lain kini mulai memudar. Ketiga, pelayaran perniagaan Kerajaan Gowa kini digantikan oleh VOC. Keempat, kehidupan rakyat Gowa mulai mendapat pengaruh Barat (Belanda). Kelima, pembesar-pembesar dan rakyat Gowa yang tidak mau tunduk pada kekuasaan VOC telah melanjutkan perjuangannya, baik dalam maupun di luar Sulawesi Selatan (Agussalim, 2016: 76). Walaupun Perjanjian Bongaya telah di sahkan dan ditandatangani, namun Speelman belum puas dalam memadamkan kebenciannya terhadap Kerajaan Gowa (Makassar) serta sekutu-sekutunya yang terlibat dalam perang. Speelman beranggapan bahwa pemerintah Kerajaan Gowa masih sangat kurang kepercayaannya terhadap VOC (Andaya, 2004: 145). Karena rasa kurang percaya, Speelman dalam pengawasan pelaksanaan Perjanjian Bongaya di Makassar juga terus memikirkan apa yang harus dilakukannya untuk mencegah timbulnya perlawanan dari Makassar.

2. Perlawanan Pasca Perang Makassar

Setelah ditandatanganinya Perjanjian Bongaya, bukan berarti perlawanan rakyat Makassar berhenti, tetapi kemudian bangsawan-bangsawan Kerajaan Gowa masih melanjutkan perlawanan. Perlawanan itu antara lain perlawanan rakyat Gowa yang dipimpin oleh Karaeng Karunrung, Karaeng Galesong, dan Karaeng Bonto Marannu, perlawanan orang Makassar di Ayuthia (Thailand), perlawanan Batara Gowa I Sangkilang dan Raja Bone La Tenritappu, serta bantuan perlawanan dari Arung Matowa Wajo La Tenrilai Tosengngeng (Agussalim, 2016: 82-87).

Perlawanan ini menunjukkan sifat orang-orang Makassar yang tidak mau diperintah oleh orang-orang Belanda (VOC).

Pada tanggal 21 April 1668 pecah lagi perang dibawah pimpinan Karaeng Karunrung (Rizal, 2004: 35-36) yang bergerak menuju *Fort Rotterdam* . Pasukan La Tenritatta Arung Palakka terus mengejar penyusupan oleh pasukan Karaeng Karunrung. Terlebih atas bantuan Belanda dan Ternate, maka pasukan Arung Palakka masih dalam keadaan aman. Pada tanggal 5 Agustus 1668, Karaeng Karunrung mencoba lagi melakukan penyusupan ke *Fort Rotterdam*, namun gerakannya ini diketahui oleh Arung Palakka dan membuat pasukan Makassar mundur, serta terus dikejar oleh pasukan Arung Palakka (Mappangara, 2004: 370). Perlu diketahui bahwa perlawanan-perlawanan dibawah pimpinan Karaeng Karunrung pasca Perjanjian Bongaya ternyata cukup menimbulkan kecemasan dan keadaan yang memburuk untuk pihak Belanda. Hal ini dapat dilihat dari Belanda yang secara diam-diam memberangkatkan 108 orang prajuritnya yang sakit dan luka-luka ke Jepara serta 100 orang meninggal (Mappangara, 2012: 339). Kemudian diakhir Oktober 1668, 265 dari 577 tentara Belanda terbaring sakit di *Fort Rotterdam*. Hal ini menambah suram perkubuan Belanda dan sekutunya (Andaya, 2004: 159). Hal inilah yang kemudian mendorong pasukan Belanda untuk tetap melakukan persiapan-persiapan antisipasi terhadap serangan selanjutnya dengan sisa-sisa kekuatan yang ada. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya Arung Palakka sebagai sekutu Belanda saat itulah yang membantu mempertahankan dan melindungi pasukan Belanda yang telah lemah.

Dalam mempertahankan kekuatan serangannya, beberapa langkah yang dilakukan Speelman saat itu antara lain (Polinggomang, 2004: 127-128):

1. Blokade ketat di sepanjang perairan Makassar, dimana kapal-kapal terus melakukan pengawasan atas datangnya serangan.
2. Penggalan Parit-parit perlindungan terus dilakukan untuk mendekati Somba Opu. Diketahui bahwa di Somba Opu terdapat istana Raja Sultan Hasanuddin.
3. Speelman membangun batteryen (meriam-meriam besar) yang larasnya dihadapkan ke Somba Opu.
4. Terus mendatangkan tenaga bantuan dari Batavia.

Pada bulan Agustus 1668, Karaeng Karunrung kembali melakukan penyerangan, namun tidak mencapai sasarannya. Kemudian dalam segala strategi yang dipersiapkan Belanda diakhir tahun 1668 hingga Juni 1669, ketika persiapan telah mantap, barulah pada tanggal 15 Juni 1669 Speelman melakukan serangan secara total. Serangan yang terus-menerus terjadi mengakibatkan pasukan

Gowa maupun Belanda ada yang tewas maupun luka parah. Namun kemudian Belanda berhasil menduduki pertahanan pertama Benteng Somba Opu. Hal ini membuka jalan semakin dekatnya istana Kerajaan Gowa. Adapun sisa prajurit Gowa yang masih berjuang tertinggal di dalam benteng terus melakukan perkelahian satu per satu, bertarung habis-habisan sampai tetes darah terakhir. Akhirnya pada tanggal 24 Juni 1669 Benteng Somba Opu dapat dikuasai oleh Belanda secara total (Mattulada., 1982:91). Dengan jatuhnya Benteng Somba Opu, maka Sultan Hasanuddin mengundurkan diri ke Benteng Kalegowa. Sementara mangkubuminya Karaeng Karunrung mengundurkan diri ke Benteng Ana' Gowa di Taenga yang terletak di seberang Sungai Je'ne Berang.

Belanda (VOC) semakin memperkuat pertahanannya di Benteng Ujung Pandang yang diganti nama menjadi Fort Rotterdam. Walaupun Perjanjian Bongaya telah selesai, namun sisa-sisa prajurit Makassar tetap melakukan perlawanan kecil. Untuk menuntaskannya, Belanda mencoba untuk memecah belah kesatuan pembesar Kerajaan Gowa dengan mengeluarkan amnesti pada siapapun yang mau menyerah. Hal ini dikatakan berhasil dengan datangnya Karaeng Tallo dan Karaeng Lengkesa. Perpecahan dan perselisihan didalam lingkungan kerajaan semakin membuat Gowa terjerumus dalam masa suram. Dengan timbulnya perpecahan ini akhirnya Speelman memutuskan untuk melakukan pukulan terakhir kepada benteng-benteng Kerajaan Gowa yang masih mempersiapkan perlawanan Benteng Gowa yang terakhir (Kale Gowa dan Ana' Gowa).

Pada tanggal 27 Juni 1669 dilakukan perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh Raja Gowa Sultan Hasanuddin sebagai kemenangan Speelman. Disusul mundurnya Sultan Hasanuddin dalam tahtanya pada 29 Juni 1669, ia digantikan oleh anaknya bernama I Mappasomba Daeng Nguraga bergelar Sultan Amir Hamzah. Tidak lama kemudian, Karaeng Galesong dan Karaeng Bontomarannu meninggalkan Gowa dengan tekad ingin meneruskan perlawanan rakyat Gowa. Dengan membawa pasukan yang terdiri dari 70 kapal dengan beberapa ribu anak buah yang sudah berlayar ke Banten atas perintah Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan kepada kerajaan Banten karena sejak lama sudah menjalin hubungan dengan Kerajaan Gowa dengan sangat baik. Dalam perjalanannya menuju Banten ini, mereka bergerilya di tengah lautan menghadapi tentara Belanda. Begitupun Kerajaan Banten yang sedang dalam peperangan menghadapi Belanda. Sehingga pada tahun 1672 armada Gowa dibawah pimpinan Karaeng Galesong (Karaeng Bontomarannu telah gugur dalam pertempuran di perairan Semarang) bahkan membantu laskar Trunojoyo dalam menghadapi Kompeni Belanda di Jawa. Pada tahun 1678 sampai 1679 barulah perlawanan Karaeng Galesong dan Trunojoyo dapat dikalahkan setelah kedua pemimpinnya gugur.

Kemenangan Belanda (VOC) yang bersekutu dengan La Tenritatta Arung Palakka secara politis menyebabkan daerah Sulawesi Selatan berada dalam kontrol kekuasaannya. Namun bukan berarti bahwa kerajaan-kerajaan utama Bugis-Makassar seperti Luwu, Gowa, Bone, dan Soppeng tunduk total dalam kekuasaan Belanda. Kerajaan-kerajaan ini masih melakukan pemerintahan serta kebijaksanaan sesuai dengan kebijakan politik masing-masing. Hegemoni Kerajaan Gowa dalam dunia perdagangan maritim akhirnya runtuh setelah Perang Makassar (1666, 1667, 1668, 1669) (Polinggomang, 2004: 136). Kerajaan Gowa dalam ekspansi hegemoni kekuasaannya di wilayah timur Nusantara dari awal abad XVI hingga akhir abad XVII kini digantikan oleh Bone sebagai kerajaan teratas di Sulawesi Selatan. Sebagaimana yang dikemukakan Mattulada dalam karyanya berjudul “Latoa” bahwa:

“Kerajaan Bone adalah sekutu Kompeni (VOC) yang tertua di Sulawesi. Setelah Perjanjian Bongaya, Bone menjadi kerajaan yang paling berpengaruh di kalangan kerajaan-kerajaan Sulawesi Selatan. Dialah yang dijadikan oleh Belanda sebagai sekutu yang digunakan untuk memelihara perimbangan kekuatan di kalangan kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan (Mattulada., 2015: 563)”

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa Kerajaan Bone tampil sebagai penguasa di Sulawesi Selatan, namun sebenarnya hal ini menjadi peluang oleh Belanda (VOC) untuk melakukan politik perdagangan di Sulawesi Selatan, mengingat Sulawesi Selatan pada saat itu menjadi salah satu daerah yang menjadi pusat perdagangan di Nusantara. Dengan demikian, secara tidak langsung Kerajaan Bone hanya sekedar menguasai sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan tetapi perdagangannya dan perekonomiannya di kuasai oleh Belanda (VOC).

3. Dampak perang Makassar Terhadap masyarakat

Pasca Perang Makassar, banyaknya perubahan-perubahan kecil maupun perubahan besar hingga mengubah kehidupan masyarakat Makassar. Hal ini dapat dilihat pada berubahnya sistem pemerintahan dan diberlakukannya peraturan yang sangat merugikan pihak Kerajaan Gowa dan menguntungkan Belanda (VOC) serta pihak Kerajaan Bone. Kemudian dilihat dari sisi perekonomian juga sangat menguntungkan pihak Belanda (VOC), sebab VOC mampu memonopoli perdagangan dan menjadi perantara dari kerajaan-kerajaan sekutu dalam melakukan kegiatan perdagangan. Pada perkembangan selanjutnya, pemerintahan Belanda (VOC) menetapkan Fort Rotterdam sebagai pusat pemerintahan dan pertahanannya di Sulawesi Selatan. Hal ini menimbulkan gerakan perlawanan-perlawanan kecil seperti perlawanan rakyat Gowa yang dipimpin oleh Karaeng Karunrung, Karaeng Galesong, dan Karaeng Bonto Marannu, perlawanan orang

Makassar di Ayuthia (Thailand), perlawanan Batara Gowa I Sangkilang dan Raja Bone La Tenritappu, dan adapun bantuan dari Arung Matowa Wajo yang membawa rakyatnya sekitar 10.000 orang. Semua itu tidak membawa dampak yang besar dalam mengembalikan kejayaan Kerajaan Gowa sebagaimana sebelumnya, melainkan hanya menimbulkan korban jiwa dari pihak yang melakukan perlawanan dan dari pihak Belanda (VOC) sendiri. Hal lain yang juga menambah penderitaan rakyat Gowa serta sebagian benteng di hancurkan. Semua pergolakan dan penderitaan ini berlangsung hingga runtuhnya VOC yang kemudian di gantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda.

- a. Dampak terhadap kerajaan Gowa: melemahnya kehidupan sosial ekonomi dan politik Kerajaan Gowa

Kemenagan yang dirai oleh aliansi antara pihak Voc dengan Kerajaan Bone yang berhasil menaklukkan kerajaan Gowa, mengakibatkan kerajaan Gowa tidak lagi menjadi pemegang hegemoni kekuasaan di Indonesia Timur baik itu dari sistem politik begitupun dengan prekonomian. Posisi kerajaan Gowa tidak lagi berada pada puncak kekuasaannya setelah dilakukannya beberapa perjanjian yang sangat merugikan kerajaan Gowa, salah satu yang sangat merugikan adalah Kerajaan Gowa harus mengganti seluruh kerugian selama perang berlangsung.

Ditandatangani perjanjian Bugaya merupakan akhir dari perlawanan Sultan Hasanuddin terhadap Voc dan Kerajaan Bone, walaupun demikian Sultan Hasanuddin masih belum menerima kenyataan yang pahit ini dan sangat menentang keberadaan Belanda di Bumi Sulawesi. namun, sebagai raja dan keselamatan rakyatnya serta kerajaan yang dipimpinnya (MD, Sultan Hasanuddin Menentang VOC, 1985) Susu. Keadaan yang sebelumnya damai dan Tentram Berubah seketika setelah terjadinya perang, Masyarakat banyak yang kemudian melarikan diri dan meninggalkan Kerajaan Gowa, serta ada pula beberapa Melakukan perlawana terhadap Belanda dengan cara melakukan Perang Gerilia. Hal ini disesuaikan dengan kondisi geografis Kerajaan Gowa.

- b. Dampak terhadap Kerajaan Bone: kemerdekaan rakyat Bone

Keinginan Arung Palakka beserta kawan-kawanya, Arung Bila, Arung Appanang, dan Arung Belo. Akhirnya terwujud setelah mereka mengalahkan Kerajaan Gowa, keinginan tersebut merupakan ucapay yang di ungkapkan tuju tahun yang lalu di polelolo ketika mereka masi merupakan pemuda buronan dari laskar Gowa, selain demikian ada pula ungkapan Arung Palakka ketika beliau bertolak dari pelabuhan Pallette menuju buton di depan gunung Cempalagai (Patunru, 1989). Sebuah sumpa untuk melakukan pembebasan terhadap masyarakat Bugis yang di jadikan Budak dikerjaan Gowa. Para budak ini dipekerjakan untuk menggali parit disekita benteng-benteng

yang ada di Makassar termasuk benteng Somba Opu yang menjadi basis utama pertahanan kerajaan Gowa. Setelah ditandatanganinya perjanjian Bugaya makan arung palakka berhasil membebaskan orang-orang Bugis dari belenggu kerajaan Gowa (Ali Tahir, Najamuddin, & Asmunandar, 2020: 11).

Dengan adanya perjanjian Bugaya yang dilaksanakan di Bugaya Barombong, mengharuskan Kerajaan Gowa melepaskan Kerajaan Bone dan Kerajaan Luwu sebagai mana yang tertera didalam perjanjian pada pasal 19 (Surjadi, 1993). Maka demikian kerajaan Bone merdeka secara politik dari kerajaan Gowa serta tidak bergantung lagi pada penguasaan kerajaan Gowa akan tetapi kerajaan Bone di beri kewenangan oleh Belanda untuk menjadi Pemimpin atau penguasa terhadap kerajaan bekas taklukan kerajaan Gowa di bawah perintah Voc. Namun demikian kendali sepenuhnya ada ditangan pemerintah Belanda dalam hal ini VOC.

c. Dampak terhadap Belanda-VOC: penguasaan perdagangan

Pada tanggal 18 November 1667 merupakan tahun dimana dilakukannya penandatanganan perjanjian Bungaya. Tanda politik Monopoli perdagangan Voc telah dimulai di Kerajaan Gowa atau dikota Makassar secara khusus dan di jazirah Indonesia Timur secara Umum. Bagi Voc perjanjian Bungaya merupakan kunci yang sangat berpengaruh kedepannya terhadap penguasaan Kerajaan Gowa dan Tallo, kunci untuk melakukan aktivitas di tanah Jazirah Sulawesi Selatan (Ali Tahir et al., 2020: 11-12). Mengingat Voc telah menaklukkan pemegang Hegemoni kekuasaan terbesar di jazirah Sulawesi Selatan yaitu Kerajaan Gowa-Tallo sehingga penanaman pemahaman serta penerapan monopoli perdagangan berjalan sesuai dengan rencana Voc dalam perjanjian Bungaya sehingga berhasil menguasai pelabuhan atau pusat perdagangan di Indonesia Timur.

VOC melalui perjanjian Bungaya membuat legitimasi untuk menanamkan pengaruhnya ke kawasan timur Nusantara terutama di Jazirah Sulawesi Selatan. Hal ini bukan tanpa alasan melainkan melihat kembali posisi Gowa yang sangat Strategis untuk melakukan perdagangan sehingga Belanda dalam hal ini Voc datang untuk melakukan penguasaan secara penuh baik itu bidang politik, ekonomi serta tatanan kehidupan yang ada di kawasan Nusantara bagian Timur, hal ini juga berdampak kepada Portugis dan Inggris karena setelah Perjanjian Bungaya seluruh kapal Portugis dan Inggris di bakar dan dilarang lagi berlabuh di Somba Opu.

Penutup

Perang Makassar merupakan salah satu perang yang sangat berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Makassar dalam hal ini Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo, dengan terjadinya perang Makassar dan kekalahan dalam peperangan tersebut membuat Makassar jatuh dari

puncak kejayaannya dan di ambil alih kekuasaannya oleh lawanya yaitu VOC dan Kerajaan Bone. Walaupun demikian hegemoni kekuasaan kemudian beralih ketangan Bone sebagai pemimpin dari kerajaan-kerajaan yang ada di jazirah Sulawesi selatan dibawah perintah kolonial hindia Belanda dalam hal ini VOC.

Perdagangan yang mulanya berpusat di Somba Opu di bawah kendali Kerajaan Gowa- Tallo, karena kekalahannya dalam peperangan maka di ambil alih oleh VOC yang berpusat di benteng Fort Rotterdam atau benteng Ujung Pandang. Selain itu dampak perang membuat VOC memonopoli perdagangan yang terjadi di pelabuhan Somba Opu yang menjadi jalur perdagangan Internasional.

Daftar Pustaka

Lontarak

Lontarak Bilang. 1985/1986. Raja Gowa dan Tallok (Naskah Makassar). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Sulawesi Selatan LaGaligo.

Buku

- Agussalim. (2016). *Prasejarah-Kemerdekaan di Sulawesi Selatan* (cet. 1). Yogyakarta: Deepublish.
- Ali Tahir, Najamuddin, & Asmunandar. (2020). Barombong dalam Konstelasi Politik Perang Makassar Abad XVI-XVII. *Attoriolog Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah*, Vol. 18 No, 1-14.
- Andaya, L. Y. (2004). *Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17*. Makassar: Innawa.
- M.C. Ricklefs. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* (ke tiga). Jakarta: Serambi.
- Mappangara, S. (2004). *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*. Ujung Pandang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mappangara, S. (2012). *Ensiklopedia Tokoh dan Peristiwa Sejarah Sulawesi Selatan*. Makassar: Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mattulada. (1982). *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah (1510- 1700)*. Makassar: Bhakti Baru Berita Utama.
- Mattulada. (2015). *Latoa; Antropologi Politik Orang Bugis*. Yogyakarta: Ombak.
- MD, S. (1985). *Sultan Hasanuddin Menentang VOC*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Patunru, A. R. (1993). *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Patunru, A. R. (1989). *Sejarah Bone*. Makassar: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.
- Patunru, A. R. (1967). *Sejarah Gowa*. Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.
- Perlas, C. (2006). *Manusia Bugis*. Jakarta: Paris EFEO.
- Polinggomang, E. L. (2004). *Sejarah Sulawesi Jilid 1*. Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Propinsi Sulawesi Selatan.
- Rizal, H. et al. (2004). *Profil Raja dan Pejuang Sulawesi Selatan*. Sungguminasa: Buana.
- Surjadi. (1993). *Eksistensi Kerajaan Gowa sampai Ditandatanganinya Perjanjian Bungaya*.

Universitan Hasanuddin.

Tika, Z. et al. (2006). *Profil Raja-raja Gowa*. Gowa. Gowa: Lembaga Kajian & Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan.